

Pendidikan Anak Perempuan di Kepulauan Saugi, Kabupaten Pangkep: Antara Tradisi dan Aspirasi

Andi Sadriani^{1*}, Ibrahim Arifin²

¹ Prodi Pendidikan Sosiologi/Universitas Negeri Makassar
E-mail: andi.sadriani@unm.ac.id

² Prodi Pendidikan Sosiologi/Universitas Negeri Makassar
E-mail: ibrahim@unm.ac.id

Abstract. *Girls' education in island regions continues to face various structural and cultural barriers that limit access and educational continuity. This study aims to analyze: (1) the condition of girls' access to education in the fishing communities of the Saugi Islands, (2) fishermen families' expectations regarding girls' education, and (3) traditional values that shape educational choices within the community. This research employs a qualitative approach with a case study design, involving 15 informants consisting of school-aged girls, parents, teachers, and community leaders. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation, and were analyzed using Miles and Huberman's interactive model with source and method triangulation. The findings reveal that: (1) girls' access to education remains limited due to inter-island distance, transportation costs, and the lack of secondary schools; (2) fishing families have strong aspirations for their daughters to pursue higher education, yet economic constraints remain the main obstacle; and (3) traditional values emphasizing domestic roles persist, though they are gradually being replaced by younger generations' educational aspirations. The study recommends island-based scholarship schemes, coastal student dormitories, marine transport subsidies, and parental gender education programs as strategic steps toward achieving educational equity in island communities.*

Keywords : Education; Girls; Fishing Community; Saugi Island

Abstrak. *Pendidikan anak perempuan di wilayah kepulauan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang membatasi akses dan keberlanjutan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kondisi akses pendidikan anak perempuan di komunitas nelayan Kepulauan Saugi, (2) harapan keluarga nelayan terhadap pendidikan anak perempuan, dan (3) nilai-nilai tradisional yang membentuk pilihan pendidikan di masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melibatkan 15 informan yang terdiri atas anak perempuan, orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber serta metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) akses pendidikan anak perempuan masih terbatas akibat jarak antar-pulau, biaya transportasi, dan keterbatasan sekolah menengah; (2) keluarga nelayan memiliki aspirasi kuat agar anak perempuan berpendidikan tinggi, namun keterbatasan ekonomi menjadi penghalang utama; dan (3) nilai tradisional yang menekankan peran domestik masih bertahan, meski mulai tergeser oleh aspirasi generasi muda. Penelitian ini merekomendasikan program beasiswa kepulauan, asrama pelajar pesisir, subsidi transportasi laut, dan edukasi gender bagi orang tua sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan di wilayah kepulauan.*

Kata Kunci : Pendidikan; Anak Perempuan; Komunitas Nelayan; Pulau Saugi

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai kebijakan nasional tentang wajib belajar. Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua warga. Namun, di berbagai daerah Indonesia, kesenjangan akses pendidikan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Salah satu bentuk ketimpangan yang paling nyata adalah kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan. Masyarakat di daerah pesisir dan pulau kecil sering kali menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.

Bagi komunitas nelayan, tantangan tersebut diperparah oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak menentu. Ketergantungan pada hasil tangkapan harian menjadikan pendidikan anak bukan prioritas utama, melainkan beban tambahan di tengah kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dalam konteks ini, anak perempuan menjadi kelompok yang paling rentan. Mereka tidak hanya dibatasi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh norma sosial dan budaya yang masih kuat menempatkan perempuan pada peran domestik. Akibatnya, pendidikan formal bagi anak perempuan sering kali dianggap tidak sepenting tugas-tugas rumah tangga.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) memang cukup tinggi, tetapi terdapat kesenjangan signifikan antarwilayah (Junaidin dan Ikong, 2021:32). Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang memiliki karakter kepulauan, mencatat partisipasi pendidikan menengah yang relatif rendah (Ramadhani dkk., 2022:11). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa persoalan pendidikan di daerah kepulauan bukan hanya soal ketersediaan sekolah, tetapi juga persoalan akses, jarak, dan biaya. Di wilayah seperti Kepulauan Saugi, kendala transportasi laut dan kondisi cuaca menjadi hambatan nyata yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak-anak. Selain faktor fisik dan ekonomi, dimensi budaya juga memiliki pengaruh besar terhadap pilihan pendidikan. Dalam komunitas nelayan, terdapat pandangan tradisional bahwa anak perempuan sebaiknya fokus pada peran domestik dan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi. Pandangan ini masih bertahan di banyak keluarga.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa budaya patriarki di masyarakat pesisir sering kali menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam hal pendidikan. Studi Rudini dan Melinda (2020:56) di pesisir Madura menemukan bahwa pendidikan anak perempuan dianggap kurang penting dibandingkan tanggung jawab rumah tangga. Hasil penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa program pemberdayaan di kawasan pesisir belum banyak menyentuh aspek pendidikan formal perempuan. Namun, sebagian studi tersebut berfokus pada wilayah pesisir Jawa atau Sumatera dan belum banyak menyoroti konteks kepulauan di Indonesia bagian timur. Padahal, karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat kepulauan berbeda dengan masyarakat pesisir daratan. (Alfaza dkk, 2025), (Almu,2018).

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penelitian ini terletak pada belum adanya kajian mendalam tentang bagaimana tradisi lokal dan aspirasi keluarga nelayan di pulau kecil seperti Kepulauan Saugi berinteraksi dalam menentukan akses pendidikan anak perempuan. Belum banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai tradisional bertemu dengan aspirasi baru terhadap pendidikan dalam konteks masyarakat kepulauan Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, masih sedikit pemahaman mengenai bagaimana anak perempuan di pulau kecil seperti Saugi menegosiasikan posisi mereka di antara tuntutan tradisi dan harapan akan mobilitas sosial melalui pendidikan. Inilah ruang kosong yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Kepulauan Saugi, yang merupakan bagian dari Kabupaten Pangkep, memiliki karakter sosial-ekonomi yang khas. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kondisi geografis yang terpencil dan keterbatasan fasilitas publik memperkuat isolasi sosial masyarakatnya. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul perubahan pandangan di kalangan masyarakat. Sebagian keluarga nelayan kini mulai menyadari pentingnya pendidikan, termasuk bagi anak perempuan, sebagai jalan keluar dari kemiskinan struktural dan keterbelakangan.

Fenomena tarik-menarik antara tradisi dan aspirasi inilah yang menjadi latar utama penelitian ini. Di satu sisi, masih kuat norma tradisional yang membatasi peran perempuan; di sisi lain, muncul kesadaran baru tentang nilai pendidikan dalam memperbaiki kehidupan keluarga. Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana kondisi akses pendidikan anak perempuan di komunitas nelayan Kepulauan Saugi?, 2) Bagaimana harapan keluarga nelayan terhadap pendidikan anak perempuan di Pulau Saugi?, dan 3) Bagaimana nilai-nilai tradisional membentuk pilihan pendidikan anak perempuan di Pulau Saugi?.

Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual, empiris, dan kebijakan. Secara konseptual penelitian ini memperkaya literatur tentang pendidikan dan gender di masyarakat kepulauan yang masih jarang dikaji. Secara empiris, penelitian ini menyajikan gambaran nyata tentang dinamika sosial pendidikan anak perempuan di wilayah pulau kecil, dan Secara kebijakan, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi program pendidikan berbasis kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat nelayan.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman baru tentang bagaimana nilai-nilai tradisional dapat bertransformasi melalui aspirasi pendidikan generasi muda. Hal ini penting untuk memahami perubahan sosial yang sedang berlangsung di masyarakat kepulauan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memotret masalah kesenjangan pendidikan, tetapi juga mengungkap dinamika sosial di baliknya antara tradisi yang masih bertahan dan aspirasi modern yang tumbuh di tengah masyarakat nelayan. Studi tentang pendidikan anak perempuan di Kepulauan Saugi diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang bagaimana perubahan sosial terjadi dari bawah, melalui proses negosiasi nilai antara keluarga, budaya, dan cita-cita pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, dan makna yang dikonstruksi oleh masyarakat terkait pendidikan anak perempuan di komunitas nelayan Kepulauan Saugi, Kabupaten Pangkep. Melalui studi kasus, penelitian ini tidak hanya berfokus pada gejala permukaan, tetapi juga memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini relevan dengan tujuan penelitian yang berupaya menafsirkan fenomena pendidikan dalam kehidupan nyata masyarakat, bukan sekadar mengukur data statistik.

Penelitian dilaksanakan di Kepulauan Saugi, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih secara sengaja (*purposive*) karena memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan. Kondisi sosial ekonomi masyarakatnya menengah ke bawah, sementara akses terhadap pendidikan masih terbatas akibat jarak antar-pulau, transportasi laut yang tidak menentu, serta cuaca ekstrem. Faktor-faktor tersebut menjadikan Pulau Saugi sebagai lokasi yang representatif untuk meneliti isu kesenjangan pendidikan anak perempuan di wilayah pesisir dan kepulauan.

Proses pengumpulan data lapangan dilakukan selama tiga bulan, yaitu mulai dari Februari hingga April 2025. Pada tahap awal, peneliti melakukan observasi pendahuluan selama dua minggu untuk mengenali konteks sosial masyarakat dan menjalin hubungan dengan tokoh lokal. Setelah itu, wawancara mendalam dilakukan selama delapan minggu secara berulang kepada para informan utama. Sisa waktu digunakan untuk verifikasi data, pengumpulan dokumen pendukung, serta member check kepada beberapa informan kunci untuk memastikan keabsahan interpretasi penelitian.

Informan penelitian ditentukan secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap isu pendidikan anak perempuan. Jumlah total informan sebanyak 15 orang, terdiri dari: lima anak perempuan usia sekolah (baik yang masih bersekolah maupun yang putus sekolah), lima orang tua, tiga guru di tingkat dasar dan menengah, serta dua tokoh masyarakat. Jumlah ini dianggap memadai karena telah memenuhi prinsip titik jenuh (*saturation point*) yaitu kondisi ketika data yang diperoleh dari wawancara tambahan tidak lagi memberikan informasi baru. Penentuan titik jenuh dilakukan dengan mempertimbangkan pengulangan tema dalam narasi dan keseragaman

persepsi antar-informan.

Kriteria pemilihan informan mencakup beberapa aspek: (1) keterlibatan langsung dalam proses pendidikan anak perempuan, (2) lama tinggal di Pulau Saugi minimal lima tahun agar memahami dinamika sosial setempat, (3) kesediaan untuk diwawancarai secara mendalam, dan (4) memiliki pandangan yang berbeda-beda untuk memperkaya variasi data. Dengan mempertimbangkan kriteria ini, pemilihan 15 informan dianggap representatif dalam menggambarkan keberagaman pandangan di komunitas nelayan Pulau Saugi. Strategi purposif ini juga memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan rumusan masalah penelitian.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka di rumah informan, di lingkungan sekolah, dan di area publik seperti dermaga atau balai nelayan. Setiap sesi wawancara berlangsung selama 30 hingga 60 menit, tergantung pada ketersediaan informan dan kedalaman tema yang dibahas. Panduan wawancara berisi beberapa tema utama, antara lain: persepsi tentang pendidikan anak perempuan, faktor ekonomi dan budaya yang memengaruhi keputusan bersekolah, serta harapan keluarga terhadap masa depan anak perempuan.

Observasi partisipan dilakukan untuk memahami kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan serta aktivitas anak perempuan di rumah dan sekolah. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat, seperti mengikuti aktivitas di pasar ikan, kegiatan keagamaan, dan pertemuan warga, guna menangkap konteks sosial yang lebih autentik. Dokumentasi diperoleh dari berbagai sumber, seperti catatan sekolah, laporan BPS Kabupaten Pangkep, dokumen Dinas Pendidikan, serta arsip lokal yang berhubungan dengan partisipasi pendidikan anak. Seluruh data dicatat dalam jurnal lapangan dan dilengkapi dengan foto serta catatan reflektif peneliti.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data hingga tahap penulisan laporan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode (Pahleviannuar dkk, 2022). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari anak perempuan, orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Sementara triangulasi metode ditempuh dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member check dengan menyampaikan ringkasan hasil sementara kepada beberapa informan untuk mengonfirmasi kesesuaian interpretasi dengan pengalaman mereka. Langkah ini penting untuk memastikan keandalan dan validitas temuan penelitian.

Seluruh proses penelitian dijalankan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian kualitatif, termasuk mendapatkan persetujuan informan (*informed consent*), menjaga kerahasiaan identitas, serta menghormati norma lokal masyarakat Pulau Saugi. Peneliti menggunakan nama samaran dalam laporan akhir dan memastikan tidak ada data yang dapat menyingkap identitas pribadi informan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang mendalam, valid, dan menggambarkan secara utuh realitas sosial mengenai pendidikan anak perempuan di Kepulauan Saugi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Akses Pendidikan Anak Perempuan di Komunitas Nelayan Kepulauan Saugi

Akses pendidikan bagi anak perempuan di Kepulauan Saugi tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis pulau yang terisolasi. Pulau ini hanya dapat dijangkau melalui perjalanan laut selama lebih dari satu jam menggunakan perahu motor dari daratan utama Pangkep. Cuaca yang kerap berubah dan kondisi laut yang tidak menentu menjadi kendala utama bagi mobilitas warga, termasuk pelajar. Dalam konteks seperti ini, pendidikan menengah menjadi kemewahan yang sulit dijangkau bagi sebagian anak perempuan.

Sekolah dasar memang tersedia di Pulau Saugi dan dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak setempat. Hampir seluruh anak perempuan menyelesaikan pendidikan dasar karena sekolah berada di lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, ketika mereka hendak melanjutkan ke tingkat menengah pertama, situasinya berubah drastis. Sekolah menengah pertama dan atas terletak di pulau lain, yang hanya dapat diakses melalui jalur laut dan memerlukan biaya tambahan untuk transportasi serta tempat tinggal.

Kondisi ini dijelaskan oleh salah satu informan, seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD. Ia mengatakan, "Saya sebenarnya mau lanjut SMP, tapi sekolahnya jauh di pulau lain. Kalau hujan angin, kapal tidak bisa jalan, jadi sering terlambat. Akhirnya orang tua bilang lebih baik di rumah saja." (Wawancara, Dwi, 2025). Kutipan tersebut menggambarkan bagaimana kondisi alam dan keterbatasan sarana transportasi menjadi faktor penghambat utama. Keputusan untuk tidak melanjutkan sekolah bukan karena kurangnya minat belajar, melainkan karena risiko perjalanan yang dianggap berbahaya dan tidak menentu. Dalam kasus Dwi, keputusan itu lebih bersifat protektif daripada penolakan terhadap pendidikan.

Pandangan serupa datang dari salah satu orang tua yang juga mengalami dilema serupa. Ia menyampaikan, "Kalau anak perempuan pergi sekolah di pulau lain, kami takut. Bukan hanya biaya, tapi juga perjalanan laut itu berbahaya kalau musim ombak. Lebih aman kalau dia tinggal di rumah saja." (Wawancara, Fatimah, 2025). Kutipan ini memperlihatkan logika perlindungan yang khas dalam masyarakat kepulauan. Keamanan anak perempuan menjadi prioritas utama keluarga, bahkan jika itu berarti menunda atau menghentikan pendidikan. Nilai-nilai kultural tentang tanggung jawab orang tua terhadap keselamatan anak perempuan berperan kuat dalam keputusan pendidikan.

Namun, tidak semua keluarga memiliki pandangan serupa. Seorang ayah yang berprofesi sebagai nelayan justru menunjukkan sikap berbeda. Ia menegaskan, "Kalau kita terus takut, anak-anak tidak akan maju. Saya kirim anak saya ke daratan Pangkep untuk sekolah, walau harus kerja lebih keras cari tambahan uang." (Wawancara, Hamsir, 2025). Pernyataan Hamsir menunjukkan adanya variasi pandangan di kalangan masyarakat. Meskipun kondisi ekonomi serba terbatas, sebagian keluarga memiliki aspirasi kuat terhadap pendidikan anak perempuan. Mereka melihat pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan, bukan sekadar beban tambahan.

Dari hasil observasi, keluarga seperti Hamsir tergolong minoritas, tetapi mereka mencerminkan perubahan cara pandang yang mulai muncul di kalangan nelayan muda. Keputusan mereka dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan paparan terhadap lingkungan luar, terutama dari media dan interaksi sosial dengan masyarakat daratan. Ini menandai munculnya aspirasi baru di tengah tradisi lama yang masih kuat.

Pandangan guru di Pulau Saugi juga memperkuat kompleksitas masalah akses pendidikan. Salah seorang guru SD mengungkapkan, "Anak-anak di Saugi banyak yang pintar, tapi untuk melanjutkan ke SMP dan SMA harus keluar pulau. Itu yang membuat banyak anak, terutama perempuan, berhenti sekolah. Anak laki-laki kadang masih dipaksakan lanjut, tapi anak perempuan lebih sering ditahan di rumah." (Wawancara, Rahma, 2025). Pernyataan ini menegaskan adanya dimensi gender dalam keputusan pendidikan. Ketika sumber daya keluarga terbatas, anak laki-laki cenderung lebih diprioritaskan untuk melanjutkan sekolah, sedangkan anak perempuan diarahkan membantu pekerjaan rumah atau aktivitas ekonomi kecil di sekitar rumah. Ini menunjukkan bias kultural yang masih melekat kuat di masyarakat kepulauan.

Menariknya, seorang anak perempuan yang tetap melanjutkan sekolah menengah di daratan memberikan perspektif yang kontras. Ia menyampaikan, "Saya tinggal di rumah tante di Pangkep supaya bisa sekolah. Awalnya orang tua ragu, tapi saya bilang saya mau belajar sungguh-sungguh. Sekarang mereka malah bangga karena nilai saya bagus." (Wawancara, Nurul, 2025). Kutipan Nurul merupakan contoh kasus positif atau konfirmasi keberhasilan (*positive case*) yang menunjukkan bahwa dengan dukungan sosial dari keluarga besar, hambatan akses dapat diatasi. Keberhasilan seperti ini menjadi bukti bahwa aspirasi terhadap pendidikan mulai tumbuh, terutama di kalangan anak perempuan yang berani mengambil inisiatif.

Namun, tidak semua kisah berjalan ideal. Salah satu informan lainnya justru menunjukkan kasus negatif (*negative case*). Ia berkata, “Saya sempat sekolah di daratan, tapi tidak lama. Biayanya besar dan saya rindu rumah. Akhirnya saya pulang dan bantu ibu jual ikan.” (Wawancara, Aisyah, 2025). Kutipan ini menggambarkan dilema yang dihadapi anak perempuan antara keinginan melanjutkan pendidikan dan tekanan emosional karena jarak dengan keluarga.

Kondisi psikologis seperti rasa rindu, kesepian, dan keterikatan dengan lingkungan sosial di pulau menjadi faktor non-ekonomi yang turut memengaruhi keberlanjutan pendidikan. Seorang tokoh masyarakat di Pulau Saugi memberikan pandangan yang lebih reflektif terhadap fenomena ini. Ia menjelaskan, “Sebenarnya orang tua di sini ingin anaknya sekolah tinggi, tapi mereka terikat dengan cara pikir lama. Kalau ada bantuan asrama atau sekolah dekat, pasti mereka izinkan semua anak, termasuk perempuan.” (Wawancara, Daeng Rapi, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hambatan pendidikan tidak semata-mata disebabkan oleh resistensi budaya, tetapi juga oleh kurangnya dukungan struktural dari pemerintah, seperti fasilitas pendidikan menengah di pulau dan sistem transportasi yang memadai. Ini berarti bahwa solusi terhadap rendahnya akses pendidikan anak perempuan harus mencakup dimensi kebijakan publik.

Analisis dari berbagai kutipan di atas menunjukkan bahwa faktor geografis, ekonomi, dan sosial-budaya saling berinteraksi dalam membentuk pola akses pendidikan anak perempuan. Faktor geografis berperan sebagai hambatan struktural yang sulit diubah, sementara faktor budaya memengaruhi keputusan keluarga dalam konteks perlindungan dan nilai tradisi. Selain itu, munculnya variasi pandangan antargenerasi juga menjadi temuan penting. Orang tua muda cenderung lebih terbuka terhadap pendidikan anak perempuan dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka mulai melihat pendidikan bukan hanya sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga di masa depan.

Dalam konteks ini, keberhasilan beberapa anak perempuan seperti Nurul memiliki makna simbolis yang besar bagi komunitas. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi anak-anak lain dan perlahan-lahan menggeser persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam pendidikan. Ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dari tradisi menuju aspirasi modern. Namun demikian, kasus seperti Aisyah mengingatkan bahwa perubahan tersebut tidak berlangsung seragam. Sebagian anak perempuan tetap terjebak dalam siklus keterbatasan yang diperkuat oleh kemiskinan struktural dan ketergantungan ekonomi keluarga pada sektor perikanan tradisional. Perubahan sosial masih terbatas pada lingkaran kecil dan belum menyentuh keseluruhan komunitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa akses pendidikan anak perempuan di Pulau Saugi merupakan hasil negosiasi antara kondisi geografis, ekonomi, dan nilai-nilai sosial-budaya. Keterbatasan fasilitas dan risiko perjalanan laut menjadi penghalang nyata, sementara norma budaya tentang peran perempuan memperkuat kendala tersebut. Meski demikian, munculnya kasus-kasus positif memperlihatkan adanya ruang perubahan sosial yang terus tumbuh. Dengan dukungan keluarga, komunitas, dan kebijakan publik yang tepat, potensi anak perempuan di Kepulauan Saugi untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi masih terbuka lebar. Perubahan ini menunjukkan bahwa tradisi dan aspirasi dapat berdialog menuju arah yang lebih setara dan berkeadilan gender.

2. Harapan Keluarga Nelayan terhadap Pendidikan Anak Perempuan di Pulau Saugi

Harapan keluarga nelayan terhadap pendidikan anak perempuan di Pulau Saugi berakar dari kesadaran bahwa pendidikan dapat menjadi jalan keluar dari kemiskinan yang mereka alami secara turun-temurun. Dalam pandangan sebagian besar keluarga, pendidikan dianggap sebagai “modal hidup” yang dapat mengubah nasib anak perempuan di masa depan. Kesadaran ini mulai tumbuh seiring dengan meningkatnya interaksi masyarakat pulau dengan dunia luar melalui media dan program pemerintah.

Seorang ayah nelayan menyampaikan pandangannya dengan nada optimistis, “Saya ingin anak perempuan saya jadi guru. Supaya dia tidak susah seperti kami yang hidup dari laut. Kalau ada

sekolah tinggi, siapa tahu bisa kerja di darat.” (Wawancara, Zulkifli, 2025). Kutipan ini mencerminkan aspirasi klasik masyarakat nelayan: keinginan agar anak-anak mereka memiliki pekerjaan yang stabil di daratan. Pekerjaan seperti guru, bidan, atau pegawai negeri dipandang sebagai simbol mobilitas sosial. Harapan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk kebanggaan sosial bagi keluarga yang berhasil menyekolahkan anaknya tinggi.

Sejalan dengan itu, para ibu nelayan juga menaruh harapan besar terhadap pendidikan anak perempuan, terutama terkait kemandirian dan penundaan pernikahan dini. Salah seorang ibu menjelaskan, “Kalau anak perempuan sekolah tinggi, dia bisa mandiri. Tidak harus menikah cepat-cepat, bisa kerja dulu. Itu harapan saya untuk anak saya.” (Wawancara, Fajriani, 2025). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pendidikan mulai dilihat bukan hanya sebagai sarana mencari pekerjaan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan perempuan. Dalam masyarakat yang masih kental dengan nilai patriarki, perubahan cara pandang ini merupakan langkah penting menuju kesetaraan gender di tingkat keluarga.

Namun, di sisi lain, banyak keluarga yang menghadapi kenyataan bahwa harapan tersebut sulit diwujudkan karena keterbatasan ekonomi. Seorang guru di Pulau Saugi menuturkan dengan nada prihatin, “Banyak orang tua yang sebenarnya mau menyekolahkan anaknya, tapi biaya menjadi kendala. Kadang hasil laut cukup, kadang tidak ada sama sekali. Jadi niat untuk menyekolahkan anak perempuan tidak selalu bisa diwujudkan.” (Wawancara, Nurfadillah, 2025). Kutipan ini memperlihatkan kesenjangan antara aspirasi dan realitas. Ketika penghasilan keluarga bergantung pada cuaca dan hasil tangkapan, keberlanjutan pendidikan anak perempuan menjadi hal yang tidak pasti. Faktor ekonomi menjadi alasan paling rasional sekaligus paling menyakitkan dalam pengambilan keputusan pendidikan.

Meskipun demikian, tidak semua keluarga menyerah pada kondisi ekonomi. Sebagian memilih strategi kreatif untuk tetap mendukung pendidikan anak mereka. Seorang ibu menceritakan pengalamannya, “Kalau suami tidak dapat banyak hasil laut, saya bantu jual kue supaya bisa kirim uang ke anak yang sekolah di Pangkep. Walau sedikit, yang penting dia bisa lanjut sekolah.” (Wawancara, Nursiah, 2025). Kutipan ini menunjukkan adanya resiliensi keluarga nelayan perempuan. Peran ibu menjadi kunci penting dalam menopang pendidikan anak, terutama anak perempuan. Upaya mereka mencerminkan bentuk pengorbanan dan kesadaran baru akan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

Namun, tidak semua orang tua sependapat bahwa pendidikan formal adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Salah seorang nelayan tua menyampaikan pandangan berbeda, “Sekolah itu bagus, tapi kalau tidak ada uang dan kerja juga susah, buat apa terlalu tinggi sekolah. Anak perempuan cukup bisa baca tulis dan bantu orang tua.” (Wawancara, Daeng Lallo, 2025). Kutipan ini mewakili *negative case* yang penting dalam penelitian ini. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berpegang pada nilai tradisional yang menilai pendidikan perempuan tidak perlu terlalu tinggi. Pandangan semacam ini memperlihatkan ketegangan antara nilai lama dan aspirasi baru dalam masyarakat kepulauan.

Walaupun pandangan konservatif itu masih ada, generasi muda nelayan mulai memperlihatkan perubahan sikap yang signifikan. Salah satu anak perempuan yang sedang menempuh SMA di daratan menyatakan, “Saya tahu orang tua susah, tapi mereka bilang saya harus sekolah supaya bisa bantu keluarga nanti. Saya ingin kerja di kota.” (Wawancara, Sari, 2025). Kutipan Sari menegaskan adanya pergeseran paradigma di kalangan anak perempuan. Mereka tidak hanya menjadi objek harapan, tetapi juga subjek yang memiliki motivasi dan kesadaran diri. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi simbol harapan kolektif bagi seluruh keluarga.

Analisis dari berbagai wawancara memperlihatkan bahwa harapan keluarga nelayan terhadap pendidikan anak perempuan bersifat ambivalen diwarnai oleh semangat perubahan tetapi dibatasi oleh realitas ekonomi dan budaya. Harapan muncul sebagai bentuk proyeksi masa depan, sedangkan keterbatasan ekonomi menjadi penjaga yang menahan langkah untuk mewujudkannya. Menariknya, harapan pendidikan juga sering kali dipengaruhi oleh pengalaman hidup orang tua sendiri. Mereka yang pernah menyesal tidak bersekolah lebih tinggi cenderung lebih gigih mendorong anak-anak

mereka untuk belajar. Dalam beberapa kasus, rasa penyesalan masa lalu menjadi sumber motivasi bagi generasi berikutnya untuk tidak mengulangi pola kemiskinan yang sama.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki akses informasi lebih baik, misalnya melalui televisi, media sosial, atau kontak dengan sanak keluarga di kota cenderung memiliki pandangan lebih progresif terhadap pendidikan anak perempuan. Sebaliknya, keluarga yang hidup terpencil dan jarang berinteraksi dengan dunia luar masih terkungkung pada nilai-nilai tradisional.

Dengan demikian, variasi harapan ini menggambarkan spektrum sosial yang dinamis di Pulau Saugi. Di satu ujung, terdapat keluarga yang sudah terbuka terhadap pentingnya pendidikan tinggi; di ujung lain, masih ada yang memandang pendidikan sekadar pelengkap moral. Di antara keduanya, terdapat kelompok transisi yang tengah bernegosiasi antara tradisi dan modernitas.

Secara keseluruhan, harapan keluarga nelayan di Pulau Saugi terhadap pendidikan anak perempuan bukanlah harapan kosong. Ia merupakan bentuk aspirasi kolektif yang terus tumbuh, meskipun berhadapan dengan keterbatasan ekonomi, akses geografis, dan nilai budaya. Harapan ini menjadi energi sosial yang dapat mendorong perubahan, terutama jika didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat kepulauan.

Dengan memahami dinamika harapan ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan bagi anak perempuan di Pulau Saugi tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi, melainkan juga sebagai simbol transformasi sosial. Dalam situasi di mana laut sering kali menentukan nasib hidup, pendidikan menjadi satu-satunya harapan bagi keluarga nelayan untuk menantang ketidakpastian masa depan.

3. Nilai Tradisional yang Membentuk Pilihan Pendidikan Anak Perempuan di Pulau Saugi

Nilai-nilai tradisional memainkan peran penting dalam membentuk keputusan keluarga terkait pendidikan anak perempuan di Pulau Saugi. Dalam masyarakat kepulauan yang masih berpegang kuat pada adat dan pandangan patriarkal, posisi perempuan umumnya dikaitkan dengan peran domestik: mengurus rumah tangga, membantu suami, dan merawat anak. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi dan masih menjadi pedoman bagi sebagian besar keluarga nelayan dalam memandang fungsi pendidikan.

Bagi sebagian orang tua, pendidikan anak perempuan dianggap tidak perlu terlalu tinggi karena dianggap tidak relevan dengan kehidupan rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga menegaskan pandangan tradisional tersebut dengan lugas, "Perempuan itu nanti juga tinggal urus rumah tangga. Jadi kalau sekolah tinggi pun ujung-ujungnya kembali di dapur. Lebih baik cepat menikah." (Wawancara, Kalsum, 2025). Kutipan ini merefleksikan pandangan lama yang menempatkan perempuan sebagai penjaga kehormatan dan kesejahteraan keluarga dari sektor domestik. Bagi sebagian masyarakat, menikah lebih cepat dianggap lebih baik daripada menunda demi sekolah karena pernikahan dianggap menjamin stabilitas sosial dan ekonomi.

Nilai tradisional semacam itu masih banyak dijumpai, terutama di kalangan orang tua yang berusia lanjut atau kurang terekspos pada lingkungan luar. Mereka menganggap pendidikan tinggi justru bisa "mengubah" anak perempuan menjadi kurang patuh atau sulit diatur. Dalam konteks ini, pendidikan sering kali disalahpahami sebagai ancaman terhadap stabilitas nilai keluarga.

Namun, generasi muda perempuan di Pulau Saugi mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Mereka mulai berani menolak pandangan lama dan memandang pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemandirian. Seorang remaja putri menyampaikan keinginannya dengan penuh semangat, "Saya ingin sekolah sampai SMA. Saya tidak mau cepat menikah. Kalau bisa saya mau jadi perawat." (Wawancara, Anggi, 2025). Pernyataan Anggi menggambarkan pergeseran nilai antar generasi. Pendidikan bagi anak perempuan kini mulai dilihat bukan hanya sebagai simbol status, tetapi juga sebagai ruang untuk meraih cita-cita pribadi. Penolakan terhadap pernikahan dini menjadi bentuk resistensi terhadap sistem nilai patriarkal yang selama ini membatasi ruang perempuan.

Perubahan pola pikir generasi muda ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari paparan media, pengalaman berinteraksi dengan guru, serta contoh tokoh perempuan berpendidikan yang

menjadi panutan di masyarakat. Fenomena ini menandai adanya pergeseran dari collective identity yang seragam menuju kesadaran individu yang lebih otonom dalam menentukan masa depan. Seorang guru di Pulau Saugi juga mengamati perubahan ini dari dekat. Ia menuturkan. "Sekarang banyak anak perempuan yang bilang ingin lanjut sekolah. Dulu kalau ditanya mau jadi apa, jawabnya menikah. Sekarang mereka sebut profesi seperti guru, bidan, atau perawat." (Wawancara, Rini, 2025). Kutipan ini memperkuat temuan bahwa transformasi nilai sedang berlangsung di tingkat ide dan aspirasi. Generasi muda mulai memiliki role model baru yang mendorong mereka untuk memandang pendidikan sebagai simbol kebanggaan dan kemajuan, bukan ancaman terhadap kehormatan keluarga.

Namun demikian, tidak semua tokoh masyarakat menyambut perubahan ini dengan antusias. Seorang tokoh adat berusia lanjut menyampaikan kekhawatirannya, "Kalau anak perempuan terlalu banyak keluar belajar ke darat, nanti lupa adat. Sekarang saja banyak yang tidak hormat pada orang tua karena merasa pintar." (Wawancara, Daeng Sambo, 2025). Pandangan ini menunjukkan kasus yang menentang (negative case) terhadap nilai-nilai modern yang mulai tumbuh. Kekhawatiran terhadap hilangnya nilai adat menunjukkan bahwa pendidikan formal masih dianggap berpotensi menggeser tatanan sosial tradisional. Resistensi seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya perubahan sosial di masyarakat kepulauan.

Meski ada kekhawatiran tersebut, sebagian tokoh masyarakat lain justru menilai perubahan nilai sebagai proses alami yang perlu diterima. Seorang tokoh muda di desa berkata, "Memang dulu orang tua lebih banyak menikahkan anak perempuannya cepat. Tapi sekarang mulai berubah. Anak-anak perempuan sendiri sudah punya cita-cita yang lebih tinggi. Itu tanda ada perubahan." (Wawancara, Rahman, 2025). Kutipan Rahman memperlihatkan adanya suara moderat yang mencoba menjembatani tradisi dan aspirasi baru. Ia menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat terjadi tanpa harus meniadakan nilai-nilai lokal. Pendidikan bisa dipahami sebagai sarana memperkuat kualitas keluarga, bukan ancaman terhadap tradisi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa nilai tradisional di Pulau Saugi sedang berada dalam fase transisi. Di satu sisi, sebagian masyarakat masih mempertahankan pola pikir lama yang menempatkan perempuan dalam ranah domestik. Di sisi lain, generasi muda dan sebagian tokoh masyarakat mulai menafsirkan ulang nilai tersebut dengan perspektif yang lebih egaliter dan progresif. Proses negosiasi nilai ini tidak berlangsung tanpa ketegangan. Dalam beberapa kasus, anak perempuan yang ingin melanjutkan sekolah harus berdebat dengan orang tua yang menolak. Namun, ada pula keluarga yang akhirnya luluh setelah melihat kesungguhan anak mereka. Dinamika ini memperlihatkan bahwa perubahan nilai sering kali berawal dari konflik kecil di ranah keluarga.

Bagi masyarakat Pulau Saugi, pendidikan perempuan kini menjadi arena pertemuan antara dua sistem nilai: tradisi yang menekankan kesetiaan pada peran domestik, dan modernitas yang membuka peluang kesetaraan. Dalam proses ini, perempuan muda muncul sebagai agen perubahan yang menegosiasikan batas-batas budaya melalui pengalaman belajar.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai tradisional masih memiliki pengaruh kuat, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa berubah. Pergeseran nilai yang mulai tampak di kalangan generasi muda menandakan bahwa pendidikan dapat menjadi katalisator bagi transformasi sosial di masyarakat kepulauan. Dengan demikian, konflik antara tradisi dan aspirasi tidak semata-mata dilihat sebagai pertentangan, melainkan sebagai proses dialektika sosial yang mendorong masyarakat menuju keseimbangan baru. Melalui pendidikan, anak perempuan di Pulau Saugi tidak hanya menantang batasan lama, tetapi juga menegosiasikan identitas mereka di tengah arus perubahan zaman.

B. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan anak perempuan di komunitas nelayan Kepulauan Saugi merupakan hasil negosiasi antara faktor struktural, kultural, dan aspirasi keluarga. Pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh jarak sekolah atau biaya transportasi, tetapi juga oleh nilai sosial dan makna yang dilekatkan masyarakat terhadap peran perempuan. Dengan demikian, akses

pendidikan di Saugi tidak bisa dipahami semata-mata sebagai masalah fasilitas, tetapi sebagai fenomena sosial yang berakar pada konstruksi budaya dan relasi gender.

Jika ditinjau melalui perspektif teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1966) dalam Ramadhan (2022), realitas sosial mengenai pendidikan anak perempuan dibentuk melalui proses interaksi sosial antara keluarga, sekolah, dan komunitas. Dalam konteks Pulau Saugi, keluarga menjadi agen utama yang menginternalisasikan makna “perempuan baik” sebagai sosok yang berbakti dan menjaga rumah. Karena itu, keputusan untuk menahan anak perempuan agar tidak melanjutkan sekolah tidak selalu dilandasi oleh penolakan terhadap pendidikan, tetapi oleh mekanisme perlindungan sosial di mana orang tua merasa bertanggung jawab menjaga keselamatan dan reputasi anak perempuan mereka. Fenomena ini menjelaskan mengapa anak perempuan lebih sering ditahan dibanding anak laki-laki, perempuan dipandang lebih rentan secara fisik dan moral terhadap risiko perjalanan laut maupun pengaruh luar.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Astuti dkk. (2021) di Kendari dan Darwis dkk. (2025) di wilayah pesisir Jawa, yang sama-sama menemukan bahwa keputusan pendidikan anak perempuan sering kali ditentukan oleh norma gender tradisional. Namun, penelitian di Saugi menambahkan konteks baru: di pulau-pulau kecil, faktor geografis memperkuat bias budaya. Risiko perjalanan antar-pulau menjadi legitimasi sosial bagi praktik patriarki seolah keputusan membatasi pendidikan anak perempuan adalah bentuk tanggung jawab, bukan diskriminasi. Ini menunjukkan bagaimana struktur lingkungan alam turut memperkuat struktur sosial.

Dari perspektif fungsionalisme Durkheim, pendidikan seharusnya menjadi sarana sosialisasi nilai dan integrasi sosial. Namun di masyarakat kepulauan, fungsi ini belum berjalan optimal karena sistem pendidikan belum mampu menjangkau kelompok marjinal. Sekolah menengah yang jauh dan biaya transportasi yang tinggi menjadikan fungsi laten pendidikan yaitu mempertahankan stratifikasi sosial lebih kuat daripada fungsi manifestasinya untuk mobilitas sosial. Anak perempuan dari keluarga nelayan, dengan demikian, tetap berada dalam lingkaran kemiskinan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam konteks perubahan nilai, munculnya aspirasi baru di kalangan anak perempuan memperlihatkan proses resistensi terhadap konstruksi sosial lama. Fenomena ini sejalan dengan temuan Karim (2024) di Bangladesh, bahwa perempuan muda di komunitas tradisional mulai menolak pernikahan dini dan berusaha menempuh pendidikan sebagai bentuk kemandirian identitas. Dengan kata lain, generasi muda perempuan di Pulau Saugi sedang membangun bentuk *agency* baru mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek perubahan sosial dalam masyarakatnya sendiri.

Dari sisi dinamika keluarga, penelitian ini menunjukkan bahwa peran ibu menjadi mediator utama antara tradisi dan perubahan. Banyak ibu nelayan yang berusaha menabung atau bekerja tambahan agar anak perempuannya bisa bersekolah lebih tinggi. Fenomena ini menunjukkan pergeseran makna peran domestik menjadi peran produktif dan edukatif. Dalam perspektif feminisme interseksional, ibu-ibu nelayan memainkan fungsi *micro-resistance* perlawanan halus terhadap struktur patriarki melalui tindakan ekonomi dan dukungan pendidikan (Hidir, 2018).

Selain menjelaskan mekanisme sosial, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan publik. Pertama, dibutuhkan skema beasiswa khusus untuk siswa dari wilayah kepulauan, terutama bagi anak perempuan dari keluarga nelayan yang berpenghasilan rendah. Beasiswa ini sebaiknya berbasis kebutuhan (*need-based scholarship*), bukan prestasi akademik semata. Kedua, program asrama daerah pesisir perlu dikembangkan agar anak-anak dari pulau terpencil dapat bersekolah tanpa harus menanggung risiko transportasi laut setiap hari. Model ini telah terbukti efektif di beberapa daerah kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara (Nasruddin dan Nina, 2025).

Ketiga, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan subsidi transportasi laut pelajar atau sistem *mobile schooling* (sekolah keliling) untuk pulau-pulau kecil. Dengan demikian, faktor geografis tidak lagi menjadi penghalang utama pendidikan. Keempat, perlu ada program pendidikan orang tua yang berfokus pada kesetaraan gender dan nilai pendidikan, misalnya melalui penyuluhan di kelompok nelayan dan kegiatan PKK. Hal ini telah terbukti dalam penelitian yang telah dilakukan oleh

Qomaruddin (2024) bahwa edukasi semacam ini dapat membantu mengubah persepsi sosial bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi.

Di sisi masyarakat sipil, lembaga lokal dan tokoh agama dapat dilibatkan dalam kampanye kesetaraan pendidikan berbasis budaya lokal. Misalnya, melalui pendekatan religius yang menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercantum dalam nilai-nilai Islam yang dianut masyarakat setempat. Pendekatan kultural semacam ini lebih mudah diterima oleh komunitas nelayan dibandingkan dengan narasi yang terlalu akademis.

Dari segi teoretis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan anak perempuan di wilayah kepulauan harus dipahami sebagai proses yang berlangsung di tiga ranah: struktural (akses dan fasilitas), kultural (nilai dan norma), dan individual (aspirasi dan resistensi). Ketiganya saling memengaruhi dalam menciptakan realitas sosial pendidikan yang kompleks. Dalam jangka panjang, perubahan signifikan hanya dapat terjadi jika kebijakan pendidikan nasional mampu menjangkau ketiga ranah ini secara bersamaan.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup studi yang relatif kecil, terbatas pada satu lokasi yakni Kepulauan Saugi, dengan jumlah informan yang tidak besar. Karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan ke seluruh komunitas nelayan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini lebih menyoroti perspektif keluarga dan anak perempuan, sehingga belum menggali secara mendalam peran pemerintah daerah atau lembaga pendidikan dalam merespons isu ini.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi komparatif antarwilayah kepulauan guna memahami pola umum dan variasi lokal dalam pendidikan anak perempuan. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan partisipatif, di mana anak perempuan terlibat langsung dalam perumusan solusi pendidikan di komunitasnya. Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga transformatif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan anak perempuan di Kepulauan Saugi adalah arena sosial yang mempertemukan tradisi dan aspirasi. Meskipun tantangan masih kuat, tanda-tanda perubahan nilai dan semangat generasi muda menunjukkan bahwa transformasi sedang berlangsung. Dengan intervensi kebijakan yang tepat, pendidikan dapat menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih setara bagi perempuan di masyarakat kepulauan Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan anak perempuan di komunitas nelayan Kepulauan Saugi, Kabupaten Pangkep, berada dalam persimpangan antara keterbatasan struktural, kekuatan tradisi, dan munculnya aspirasi baru. Pertama, akses pendidikan anak perempuan masih sangat terbatas akibat kondisi geografis kepulauan, minimnya fasilitas pendidikan menengah di pulau, serta biaya transportasi dan hidup yang sulit dijangkau oleh keluarga nelayan. Kondisi ini membuat angka putus sekolah pada anak perempuan relatif tinggi setelah jenjang pendidikan dasar.

Kedua, meskipun menghadapi hambatan tersebut, keluarga nelayan tetap menyimpan harapan besar terhadap pendidikan anak perempuan. Harapan itu didorong oleh kesadaran bahwa pendidikan dapat menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik. Akan tetapi, harapan ini kerap berbenturan dengan keterbatasan ekonomi keluarga yang menjadikan dukungan pendidikan tidak selalu dapat diwujudkan secara konsisten.

Ketiga, nilai tradisional masih memengaruhi pilihan pendidikan anak perempuan. Pandangan bahwa perempuan sebaiknya fokus pada ranah domestik dan pernikahan dini masih cukup kuat, sehingga pendidikan formal sering kali dianggap bukan prioritas utama. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya gejala perubahan nilai, di mana generasi muda perempuan mulai membangun aspirasi baru untuk melanjutkan pendidikan dan meraih kemandirian.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan anak perempuan di Pulau Saugi bukan hanya persoalan akses fisik, tetapi juga persoalan nilai, peran gender, dan kondisi sosial ekonomi keluarga nelayan. Temuan ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan yang berpihak pada masyarakat kepulauan, baik berupa penyediaan akses pendidikan menengah di pulau maupun

program yang mendukung perubahan pandangan masyarakat tentang peran perempuan dalam pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaza, A. R. I., Syamsi, A., & Udin, T. 2025. Pendidikan Anak Nelayan di Desa Eretan Wetan: Pendekatan Berbasis Komunitas untuk Mengatasi Tantangan dan Mendorong Pemberdayaan Masyarakat. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(1), 01-13.
- Almu, F. F. 2018. Lingkungan Tempat Tinggal dan Pendapatan Keluarga terhadap Tingkat Pendidikan Anak (Studi Tentang Anak Nelayan Migran Sulawesi Selatan di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, NTT). *The Journal of Society and Media*, 2(2), 154-166.
- Astuti, W., Sion, H., & Erang, D. 2021. Pengaruh Pendidikan dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Keluarga Nelayan Tradisional Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. *Edunomics Journal*, 2(1), 35-42.
- Darwis, N., Ruslang, R., Yammar, Y., Azis, A. Y., & Puspita, H. 2025. Eksplorasi Pendidikan Kesehatan Ibu tentang Stimulasi Perkembangan Anak pada Masyarakat Nelayan Kabupaten Bone. *Journal Research of Nurswifery*, 1(1), 1-13.
- Hidir, A., & Malik, R. 2024. *Teori sosiologi modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Junaidin, J., & Ikong, I. 2021. Peranan Keluarga Nelayan Dalam Pendidikan Anak. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 21(2).
- Karim, S. N., Sultana, T. M., Hossain, M. Z., Haque, A. M., & Hossain, I. 2024. Limited access to education for child labors: A study of Bangladesh's Khulna City Terbatasnya akses terhadap pendidikan bagi pekerja anak: Studi di Kota Khulna di Bangladesh. *Jurnal Sosiologi Dialektika Vol*, 19(1), 39-50.
- Nasrudin, S. H., MH, M., & Nina Nursari, S. E. 2025. *Buku Pengantar Sosiologi (Teori, Realitas, dan Transformasi Sosial di Abad 21)*. Penerbit Widina.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., ... & Sinthania, D. 2022. *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. 2024. Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84.
- Ramadhani, M. D. P., Suhaeb, F. W., & Idrus, I. I. 2022. Permasalahan Pendidikan Anak Nelayan Miskin Di Kampung Nelayan Untia Kota Makassar. *Jurnal Predestinasi*, 15(1), 1-8.
- Rudini, M., & Melinda, M. 2020. Motivasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Siswa SDN Sandana (Studi Pada Keluarga Nelayan Dusun Nelayan). *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 2(2).